



PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sri Suranta*
Sulardi
Halim Dedy Perdana

Universitas Sebelas Maret
*email: srisuranta@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to examine the disclosure of accountability of local governments in Indonesia. The problem of this research is whether there are differences in disclosure of accountability between Regional Governments in Java and outside Java Islands. The population of this study is all local governments, both regencies and cities in Indonesia, while the sample is all regencies/cities in Indonesia other than provincial governments. The data of this study are the 2017 Regional Government Financial Statements. Data analysis is to determine the normality of the data using the Kolmogorov-Smirnov test. Hypothesis testing uses the Mann-Whitney test, because the data are not normally distributed. The results of this study are that there are differences in disclosure of accountability between Regional Governments in Java and Outside of Java. Another finding is that the level of disclosure on the island of Java is higher than on the Outside Island of Java.

INFO ARTIKEL

Diterima: 28 September 2019
Direview: 30 September 2019
Disetujui: 3 Februari 2020
Terbit: 30 Juni 2020

Keywords:

Responsibility Disclosure,
Financial Statements, Local
Government

PENDAHULUAN

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi kepada publik. Tuntutan ini disebabkan tujuan umum dari pelaporan tahunan sektor publik khususnya pemerintah daerah adalah akuntabilitas dan pengambilan keputusan (Ryan, Stanley, and Nelson, 2002). Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah dalam bentuk laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan sistem akuntansi untuk lingkungan pemerintah daerah yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam hubungannya dengan akuntabilitas keuangan, transparansi mengandung arti penyajian laporan keuangan yang terbuka, terutama mengenai informasi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Hal ini terlihat dari upaya dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebelumnya. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, diharuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk perhitungan anggaran, paling tidak terdapat beberapa kelemahan berikut ini.

Pertama, laporan perhitungan anggaran hanya menginformasikan aliran kas pada APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh DPRD, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Kedua, selain muatan informasinya terbatas, proses penyampaiannya kepada legislatif sangat lambat. Ketiga, informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran kurang dapat diandalkan karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Dengan demikian, bila dibandingkan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berlaku saat ini dengan periode sebelumnya, dapat dilihat bahwa cakupan informasi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih luas namun penyampaiannya tidak terlambat. Dengan kata lain, sejak diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, terdapat upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah.

Seiring dengan makin majunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka terjadi perubahan kebutuhan atas teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya tidak saja dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, tetapi juga meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Dengan bertambahnya komponen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, seyogyanya terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar yang memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang. Selain itu, ketertarikan publik atas informasi yang terkandung di dalam akan meningkat ketika *disclosures* dan kualitas laporan tahunan pemerintah daerah meningkat setiap waktunya (Ryan, Stanley and Nelson, 2002).

Penelitian ini pernah dilakukan di beberapa negara, tetapi masih jarang dilakukan di Indonesia sebelumnya yang selama ini sebagian besar lebih berfokus pada penganggaran partisipatif, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan kemakmuran daerah yang dinilai dengan derajat desentralisasi fiskal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengungkapan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah di Indonesia.

Berdasar uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkat pengungkapan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia?” Lebih spesifik, rumusan masalahnya adalah: “Apakah terdapat perbedaan pengungkapan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara Pulau Jawa dengan Pulau Luar Jawa?”

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota digunakan sebagai sarana dalam memberikan informasi keuangan kepada pengguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, pengguna informasi di antaranya: (a) masyarakat, (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, (d) pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa seluruh informasi yang dianggap material

agar diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi-informasi tersebut dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan maksud agar laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna secara umum (Naopal, Rahayu, dan Yudowati, 2017).

Riset Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Kiranayanti dan Erawati (2016) meneliti pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Badung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data di penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 108 buah kepada pegawai SKPD Kabupaten Badung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman basis akruar berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017) melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah” studi kasus di Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas, dan badan. Sebanyak 28 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) sebagai responden penelitian. Hasil penelitian adalah kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Setyaningrum dan Febriyani (2012), melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009. Temuannya adalah rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 52,09%.

Lesmana (2010) melakukan pengujian pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib LKPD di Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 439 LKPD yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Hasilnya adalah umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada pengungkapan wajib, namun ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Temuan yang lain adalah rata-rata pengungkapan LKPD sebesar 22%. Berdasar riset sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah antara Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi di Indonesia dengan menggunakan metode pengumpulan data secara *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel dengan memenuhi kriteria tertentu. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Indonesia periode 2017, dan (2) Mendapat opini WTP dan WTP DPP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Anis dan Ghozali (2003) menyatakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoritas. Di Indonesia, pengungkapan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai informasi wajib yang disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya (Lesmana, 2010). Kerangka Konseptual SAP mengharuskan

pengungkapan penuh (*full disclosure*) yang dimana laporan keuangan menyajikan informasi yang lengkap dan berguna bagi penggunanya pada muka laporan keuangan maupun pada CaLK. Variabel ini diukur dengan menggunakan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 65 (enam puluh lima) pernyataan.

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini melakukan penelusuran ke beberapa dokumen berupa laporan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada periode 2017. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari website resmi DJPK (Dirjen Perimbangan Keuangan) di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data untuk mengetahui data normal atau tidak. Uji normalitas data bertujuan untuk menentukan metode alat uji hipotesis penelitian. Analisis normalitas ini diperlukan sebagai persyaratan dari uji beda untuk dua sampel yang independen. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini akan digunakan uji nonparametrik yaitu uji *Kolmogrov-Smirnov*. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah: (1) Bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal maka digunakan uji beda *Independent Sample T Test*, (2) Namun bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal maka digunakan uji beda *Mann-Whitney- U Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua satuan kerja (satker) Kabupaten dan Kota Propinsi di Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 542 satker. Adapun sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Populasi (satker)	542
2.	Satker Pemerintahan Propinsi	(34)
3.	Sampel Penelitian	508

Sumber: Data Diolah

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ungkap	508	37,00	72,00	60,7933	4,73422
Valid N (listwise)	508				

Sumber: Data diolah

Berdasar tabel di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pengungkapan pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 37 persen, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, sedang pengungkapan maksimum sebesar 72 persen, yaitu Kabupaten Tanjung Bujur Timur dan rata-rata pengungkapan sebesar 60,7 persen.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Ungkap
N		508
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	60,7933
	Std. Deviation	4,73422
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,075
	Negative	-,112
Kolmogorov-Smirnov Z		2,534
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, data penelitian ini adalah tidak normal karena nilai signifikansi Uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasar hasil tersebut, uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Mann-Whitney.

Uji Hipotesis

Tabel 4 Statistik Grup Hipotesis

		Ranks		
Sampel		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Ungkap	1. P. Jawa	113	281,27	31783,00
	2. P. Luar Jawa	395	246,84	97503,00
	Total	508		
	Mann-Whitney U	19293,000		
	Wilcoxon W	97503,000		
	Z	-2,210		
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,027		

a. Grouping Variable:

Jawa/Luar

Berdasar tabel di atas, nilai signifikansi Mann-Whitney sebesar 0,027, nilai ini lebih kecil dari alfa yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini berarti hipotesis penelitian ini diterima, yaitu terdapat perbedaan pengungkapan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dengan di Pulau Luar Jawa. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pengungkapan pertanggungjawaban di Pulau Jawa sebesar 281,27 lebih besar dibanding pengungkapan di Pulau Luar Jawa, yaitu 246,84.

Pembahasan

Berdasar hasil analisis data dan pengujian hipotesis, temuan penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengungkapan pertanggungjawaban LKPD antara Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dengan di Pulau Luar Jawa. Temuan yang lain adalah rata-rata pengungkapan pertanggungjawaban LKPD di Pulau Jawa lebih besar dibanding di Luar Pulau Jawa. Pengungkapan pertanggungjawaban LKPD tahun 2017 menunjukkan rata-rata sebesar 60,79% dengan 65 butir pengungkapan. Nilai ini lebih besar dari rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh Mandasari (2009), yaitu sebesar 52,57%, dengan 34 butir pengungkapan dan Lesmana (2010), sebesar hanya 22%, dengan 46 butir pengungkapan.

Berdasar temuan tersebut, Pemerintah Pusat perlu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya untuk Kabupaten/Kota di Pulau Luar Jawa. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tersebut dengan cara meningkatkan infrastruktur di Pulau Luar Jawa. Infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan kemakmuran yang meningkat hal ini berarti kinerja pemerintah

daerah juga dapat meningkat. Hasil penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 tentang Percepatan Infrastruktur Prioritas.

Di samping itu, Pemerintah Pusat perlu memberikan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis (Bimtek) serta pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemda khususnya Pulau Luar Jawa tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasar Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 beserta aturan lain yang berkaitan dengan aturan tersebut. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga pertanggungjawaban pengungkapan Laporan Keuangan tersebut dapat optimal.

KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengungkapan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi di Pulau Jawa dengan Pulau di Luar Jawa. Selain itu, pengungkapan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Pulau Jawa lebih besar dibanding Propinsi Pulau di Luar Jawa. Keterbatasan penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan hanya pada tahun 2017. Untuk penelitian mendatang diharapkan dapat mengambil sampel dengan menambah periode penelitian lebih dari 1 tahun.

REFERENSI

- Chariri, Anis dan Imam Gozali. (2003). Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Efendi, L., Darwanis, dan Abdullah S. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3 (2), 182-195.
- Kiranayanti, Ida A.E., dan Erawati, Ni Made A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, 1290-1318.
- Lesmana, Sigit Indra. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Tesis tidak dipublikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Mandasari, Putriesti. (2009). *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government*. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
- Naopal, F., Rahayu, S. & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ASSETS*, Vol.7 No. 1.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ryan, C., T. Stanley, and M. Nelson. 2002. "Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997 - 1999". *Financial Accountability and Management*, 18 (3), August 2002, pp. 261 – 289.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. (2012) Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2012 , hal. 154-170